SISTEM PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

(Laporan Akhir)

Oleh

ANGGA SANDIKA

2101051024

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024

SISTEM PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

ANGGA SANDIKA

2101051024

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md,) PERPAJAKAN

Pada

Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024

ABSTRAK

SISTEM PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG

OLEH

ANGGA SANDIKA

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian maka penelitian ini bertujuan untuk menyajikan Sistem Penerimaan Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat objektif seperti studi pustaka, observasi, dokumentasi dan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan bagian bidang perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Berdasarkan penelitian sistem penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung belum efektif dimana Tanda Bukti Penerimaan (TBP) tidak dibuat dua rangkap, sehingga tidak ada fungsi control didalam akuntansi, hal tersebut mencerminkan internal control yang masih lemah. Dalam penyusunan laporan ini penulis menggunakan berbagai sumber seperti Peraturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Buku, Jurnal, dan Dokumen Perusahaan.

Kata Kunci: Sistem, Retribusi Parkir

ABSTRACT

PARKING RETRIBUTION SYSTEM AT THE TRANSPORTATION DEPARTMENT OF BANDAR LAMPUNG CITY

By

ANGGA SANDIKA

In accordance with the problems raised in the study, this study aims to present the Parking Retribution Receipt System at the Transportation Department of Bandar Lampung City. The author uses objective data collection methods such as literature studies, observations, documentation and interviews or face-to-face meetings directly with the parking division of the Transportation Department of Bandar Lampung City. Based on the study, the parking retribution receipt system at the Transportation Department of Bandar Lampung City is not yet effective where the Receipt Receipt (TBP) is not made in duplicate, so there is no control function in accounting, this reflects weak internal control. In compiling this report, the author uses various sources such as Laws, Government Regulations, Books, Journals, and Company Documents.

Keywords: System, Parking Retribution

Judul Skripsi	:	**SISTEM PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG**
Nama Mahasiswa	:	*Angga Sandika*
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**2101051024**
Program Studi	:	**D III Perpajakan**
Jurusan	:	**Akuntansi**
Fakultas	:	**Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

Menyetujui, Pembimbing Laporan Akhir	Mengetahui, Ketua Program Studi D III Perpajakan
Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.	**Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**
NIP 19881124 201504 2 004	NIP. 19740922 200003 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak.** .....

Penguji Utama : **Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak.** .....

Sekretaris Penguji : **Rialdi Azhar, S.E., M.S.A.,Ak.** .....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir: **24 Oktober 2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

"SISTEM PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG "

Adalah hasil saya sendiri:

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat kesalahan atau sebagaian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa sepengetahuan pengakuan pada penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatallkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 November 2024

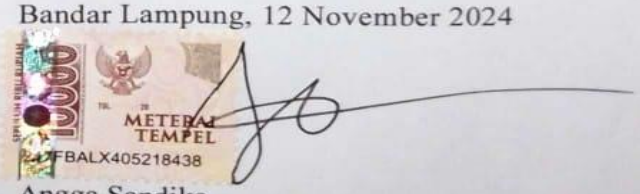

Angga Sandika
NPM. 2101051024

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Angga Sandika yang dilahirkan di Natar, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan pada tanggal 13 September 2000, sebagai anak kelima dari lima bersaudara, buah cinta dari pasangan Bapak Tamrin (Alm) dan Ibu Bainah.

Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Natar pada tahun 2014, lalu Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Natar yang diselesaikan pada tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Natar yang diselesaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan di Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis tergabung dalam Anggota Aktif Himpunan Mahasiswa Akuntansi 2021, Anggota Aktif EBEC 2021.

Pada tahun 2024 penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai sumber pengambilan data Tugas Akhir (TA) di Dinas Perehubungan Kota Bandar Lampung dari tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024.

MOTTO

“Temukan Keindahan Dalam Kesederhanaan”

“Pada Saat-Saat Gelap Kita, Kita Harus Fokus Untuk Melihat Cahaya“
-Aristoteles

P E R S E M B A H A N

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, dengan tulus kupersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Tamrin (Alm) dan Ibu Bainah) serta keluarga besarku yang menjadi salah satu alasan terbesarku untuk terus berjuang dan bertahan hingga saat ini dengan segala pengorbanan yang tak terhingga, dengan ketulusan yang tiada henti selalu mendoakan dan mendukung di setiap langkah dalam hidupku, serta selalu mengupayakan yang terbaik untuk diriku. Aku mampu berada sampai di titik ini bukan karena aku hebat, melainkan do'a dan perjuangan orang tuaku yang kuat dan hebat.

serta Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan Syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam pun tak lupa penulus kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik.

Laporan Akhir berjudul **"Sistem Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung"** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (Amd. Pjk) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam penulisan Laporan Akhir ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian Laporan Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan dukungan dari banyak pihak untuk membantu penulis dalam penyelesaian Laporan Akhir ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimkasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., CA. selaku dosen pembimbing akademik penulis.
4. Ibu Widya Rizki Eka, S.E., M.S.Ak. selaku pembimbing Laporan Akhir Penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
6. Kepada seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan konstribusi dalam penyelesaian laporan akhir ini.
7. Karyawan/Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, terimakasih telah membantu penulis dalam memberikan data untuk menyelesaikan penulisan laporan akhir ini serta pengalaman berharganya.
8. Teristimewa untuk kedua orangtuaku tercinta, Bapak Tamrin (Alm) dan Ibu

Bainah terimakasih untuk segalanya. Terimakasih atas restu & do'a tulus untukku, selalu mendukung dan memberikan yang terbaik untukku. Terimakasih atas semua pengorbanan dan jeripayah kalian untuk hidupku, Terimakasih sudah menjadi motivasi terbaik dalam setiap langkahku hingga saat ini. Semoga Allah senantiasa menjauhkan hal-hal buruk dan Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, keimanan dan kebahagiaan.

9. Untuk kakak-kakakku tersayang Uni, Aying, Abi, dan Ibu Desi Terimakasih telah menjadi garda terdepan dan segalanya untukku, terimakasih sudah menjadi kakak terhebat dan terkuat, terimakasih sudah selalu menjadi panutan terbaikku, semangat berjuang dan semoga bahagia selalu di setiap proses perjalanan hidupmu.
10. Untuk partnerku di segala bidang, Annisya FauziatiTerimakasih sudah selalu ada disaat susah dan senang dan terimakasih sudah bersedia menemani hingga saat ini, mendengarkan semua cerita disetiap harinya, dan mau berjuang bersama, semangat selalu untuk setiap perjalanan hidupmu.
11. Untuk teman teman-teman seperbimbingan (Nova, Netti, dan Lukman), Terimakasih sudah memberikan semangat dan dukungannya selama penyelesaian laporan akhir ini, terimakasih atas segala kebaikan yang diberikan dan terimakasih sudah selalu kompak.
12. Untuk Keluarga Besar Pajak angkatan 2021 yang penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu. Terimakasih 3 tahunnya yang berharga ini. See you on top guys.
13. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

Bandar Lampung, 20 September 2024

Penulis,

Angga Sandika

NPM. 2101051024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir ini dengan judul "Sistem Penerimaan Retribusi Prkir Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung." Laporan akhir ini dibuat sebagai syarat kelulusan untuk mempunyai gelar Ahli Madya (A.Md).

Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah SWT selalu memudahkan setiap langkah kita dan memberikan kesuksesan dunia dan akhirat serta semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 20 September 2024
Penulis

Angga Sandika
NPM. 2101051024

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
COVER JUDUL ..... **ii**
ABSTRAK ..... **iii**
RIWAYAT HIDUP ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
SANWACANA ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

BAB I
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 3
1.3 Tujuan Laporan Akhir 3
1.4 Manfaat Laporan Akhir 4

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA **5**
2.1 Definisi Retribusi 5
2.1.1 Pengertian Retribusi 5
2.1.2 Fungsi Retribusi 5
2.1.3 Jenis-Jenis Retribusi 6
2.1.4 Retribusi Parkir 9
2.1.5 Subjek dan Objek Retribusi Parkir 10
2.2 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi 10
2.3 Pengertian Sistem 11

BAB III
METODE DAN PROSES PENYELESAIAN **12**
3.1 Desain Laporan Akhir 12
3.2 Jenis Data dan Sumber Data 12
3.2.1 Jenis Data 12
3.2.2 Sumber Data 12
3.3 Metode Pengumpulan Data 13
3.4 Objek Laporan Akhir 13
3.4.1 Lokasi dan Waktu 13
3.4.2 Profil Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 13
3.4.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 14
3.4.4 Bidang Usaha Instansi 15
3.4.5 Visi dan Misi 16

BAB III
METODE DAN PROSES PENYELESAIAN 18
4.1 Sistem Penerimaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 18
4.2 Pihak Yang Terlibat Terkait Sistem Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 20
4.3 Dokumen Yang Digunakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Sistem Penerimaan Retribusi Parkir.....20
4.4 Alur Sistem Penerimaan Retribusi Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 21
4.5 Kendala-Kendala Dalam Penerimaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung 23

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN.....25
5.1. Simpulan 25
5.2. Saran.....25

DAFTAR PUSTAKA
Daftar Pustaka.....26

LAMPIRAN.....28

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1.1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir.....2

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

3.4.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....14
4.1 Alur Sistem Penerimaan Retribusi Parkir.....22
4.2 Flowchart Usulan.....24

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup. Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah/kota untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti; Retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi parkir adalah tempat parkir yang belum tentu dikenakan pajak daerah, karena beberapa tempat parkir dikenakan pajak daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Retribusi daerah adalah retribusi daerah atas pengeluaran izin atau jasa tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah atas nama perseorangan atau badan pembayaran. Salah satu tujuan dari retribusi parkir adalah untuk mengatur tempat parkir agar dapat digunakan sesering mungkin. Besaran retribusi parkir memang tidak sepenting retribusi lainnya, namun memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Selain itu, PAD ini akan digunakan untuk mendanai pembangunan guna memenuhi kebutuhan berbagai masyarakat lainnya.

Sumber pendapatan asli daerah akan berperan sangat penting, sehingga pemerintah daerah harus mampu mengolah dan menilai sumber-sumber daya dalam pendapatan daerah sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kontribusi yang ada dalam pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi daerah akan berperan penting dalam mendukung peningkatan pendapatan asli dari sebuah daerah. Pajak yang dapat diterapkan dalam sebuah daerah serta retribusi parkir salah satunya mempunyai prospek cerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Beberapa permasalahan juga ditemukan dalam proses pemungutan retribusi parkir. Sistem pemungutan yang masih banyak celah dan permasalahan yang terjadi menyebabkan hilangnya potensi penerimaan retribusi parkir, dalam sistem retribusi parkir sering terjadi permasalahan diantaranya, masih terdapat kecurangan di dalam sistem penerimaan biaya parkir, kemudian masih menggunakan sistem manual di dalam pemungutan biaya parkir yaitu masih menggunakan sistem tiket kertas, kurangnya pemeliharaan fasilitas parkir dengan baik. Permasalahan tersebut dapat mengakibatkan kurang efektifnya sistem penerimaan retribusi parkir, kemudian juga mempengaruhi kualitas dan kenyamanan layanan parkir.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Kepala Bidang Perparkiran bahwasannya sistem penerimaan retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung juga memiliki permasalahan yaitu masih terdapat parkir liar, keterbatasan lahan parkir, kurangnya pengawasan terhadap petugas parkir, dampak dari beberapa permasalahan tersebut menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi parkir, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir

No	Tahun	Target Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)
1	2019	Rp 7.600.000.000,00	Rp 4.900.000.000,00
2	2020	Rp 7.600.000.000,00	Rp 1.900.000.000,00

3	2021	Rp	5.000.000.000,00	Rp	1.200.000.000,00
4	2022	Rp	2.000.000.000,00	Rp	800.000.000,00
5	2023	Rp	2.000.000.000,00	Rp	600.000.000,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2019-2023 target yang di tetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan penerimaan retribusi parkir.

Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pemungutan serta penerimaan retribusi yang berkaitan dengan retribusi jasa umum salah satunya adalah retribusi parkir. Tugas akhir ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan dan pemungutan serta penerimaan retribusi parkir. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul "**Sistem Penerimaan Retribusi Prkir Pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang di atas, dasar-dasar menentukan masalah apa yang akan dibahas dalam laporan akhir. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penerimaan retribusi parkir Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung?
2. Apa kendala-kendala dalam penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Laporan Akhir

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam melakukan penulisan laporan akhir ini adalah:

1. Untuk menjelaskan sistem penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
2. Untuk menjelaskan kendala Dinas Perhubungan dalam penerimaan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Laporan Akhir

Adapun manfaat dari penulisan laporan akhir ini adalah:

1. Bagi penulis, laporan akhir ini memperluas pengetahuan dan wawasan penulis serta memahami pengelolaan dalam bidang retribusi pakir dan juga sebagai syarat kelulusan Prodi DIII Perpajakan.
2. Bagi Dinas Perhubungan, laporan akhir ini dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan terutama pada bidang perparkiran.
3. Bagi pihak lain, laporan akhir ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan retribusi parkir.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Retribusi

2.1.1 Pengertian Retribusi

Undang-undang Pajak Daerah No.28 Pasal 1 angka 64 Tahun 2009 menyatakan bahwa Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat (Rumengan., 2020). Pengertian retribusi lain menurut Rachmawati (2021) adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran.

2.1.2 Fungsi Retribusi

Menurut Menurut Lianda (2021) ada beberapa fungsi retribusi yaitu:

1. Sumber Pendapatan Daerah

   Jika Daerah telah memiliki sumber Pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah pusat tidak memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu Pembangunan Daerah. Peran serta Pemerintah Pusat dalam hal pembangunan Daerah bisa berupa pemberian bantuan Daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau apreasiasi sejenis tunjangan bagi tenaga Pemerintahan Daerah.

2. Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

   Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan ekonomi di daerah, yang mana retribusi menjadi salah satu sumber keuangannya. Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

3. Sarana Stabilitas Ekonomi Daerah

   Retribusi yang masuk ke Kas Daerah secara rutin akan menjadikan Perekonomian Daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya penyelenggaran Pemerintah Daerah telah disokong oleh retribusi.

4. Pemerataan Pembangunan Dan Pendapatan Masyarakat

   Jika poin-poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada pembangunan dan Pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta tarif hidup masyarakat.

2.1.3 Jenis-Jenis Retribusi

Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yaitu:

1. Retribusi Jasa Pelayanan Umum, yaitu Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh umum baik perorangan ataupun badan. Yang termasuk jasa pelayanan umum yaitu : a) Retribusi pelayanan Kesehatan, b) Retribusi pelayanan kesampahan/kebersihan, c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, d) Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat, e) Retribusi pelayanan parkir, f) Retribusi pelayanan pasar, g) Retribusi pengujin kendaraan bermotor, h) Retribusi

pemeriksaan alat pemadam kebakaran, i) Retribusi penggantian biaya cetak peta, j) Retribusi penyediaan/penyedotan kakus, k) Retribusi pengolah limbah cair, l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang, m)Retribusi pelayanan Pendidikan, n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan o) Retribusi pengendalian lalu lintas. Yang tidak termasuk dalam jasa ini adalah jasa urusan umum Pemerintah. Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara opimal atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Yang termasuk retribusi jasa usaha yaitu; a) Retribusi pemakai kekayaan daerah, b) Retribusi pasar grosir/pertokoan, c) Retribusi tempat pelelangan, d) Retribusi terminal,e) Retribusi tempat khusus parkir, f) Retribusi tempat penginapan/villa, g) Retribusi rumah potong hewan, h) Retribusi pelayanan kepelabuhan, i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, j) Retribusi penyeberangan di air, dan k) Retribusi penjualan produk usaha Daerah.Tarif retribusi jasa usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dalam artian keuntungan diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, usaha, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang termasuk retribusi perizinan tertentu yaitu; a) Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, c) Retribusi izin gangguan, d) Retribusi izin trayek, e) Retribusi izin usaha perikanan, dan f) Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA). Tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izinn, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. usaha, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang termasuk retribusi perizinan tertentu yaitu; a) Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, c) Retribusi izin gangguan, d) Retribusi izin trayek, e) Retribusi izin usaha perikanan, dan f) Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA). Tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izinn, pengawasan di lapangan,

penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

2.1.4 Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah biaya yang dipungut atas pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di badan jalan, masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi. Karakteristik parkir berkaitan dengan besarnya jumlah kebutuhan parkir yang harus disediakan meliputi kapasitas parkir, volume parkir, akumulasi parkir, durasi parkir, tingkat penggunaan parkir, kebutuhan parkir, indeks parkir, pengawasan lalu lintas pada umumnya. (Pratama, 2021).

Menurut Dewi. (2013) Salah satu retribusi yang memberikan pengaruh bagi Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi parkir, yang dimaksud dengan retribusi parkir sendiri ialah pembayaran atas jasa pelayananpenyediaan tempat parkir 9 yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari masyarakat, dimana pengeloalaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Retribusi parkir memiliki arti sebagai tempat parkir yang tidak selalu terkena pajak daerah. Hal ini karena retribusi parkir termasuk objek retribusi daerah. Dalam arti lain, tempat parkir tersebut sudah diizinkan atau disediakan khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan.

Retribusi parkir diambil dari orang-orang yang menggunakan jasa parkir yang dikelola pemerintah. Salah satu tujuan retribusi parkir yaitu untuk meningkatkan penyediaan layanan pemerintah serta memperkuat otonomi daerah.

Dari retribusi parkir yang dikumpulkan, hasilnya akan diserahkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk sarana dan prasarana jasa pelayanan.

2.1.5 Subjek dan Objek Retribusi Parkir

Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Adapun umumnya subyek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum atau tempat-tempat khusus.Wajib retribusi parkir sendiri adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi parkir.Objek Retribusi Parkir adalah penyediaan pelayanan Parkir di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.Adapun umumnya subjek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus, misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan.

2.2 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi

Adapun dasar hukum pemungutan Retribusi Daerah, yaitu :

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1 ayat 64.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

2.3 Pengertian Sistem

Menurut Hall (2007) sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama. Sedangkan menurut Susanto (2004) sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya.

BAB III

METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Penulisan Laporan Akhir ini menggunakan metode deskriptif, metode deskriptif adalah mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisa serta mengimprestasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan situasi aktual yang terjadi pada perusahaan kemudian mengambil kesimpulan. Laporan Akhir ini akan menganalisa tentang retribusi parkir.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang disajikan dalam Laporan Akhir ini menggunakan data deskriptif kuantitatif. Artinya penulis menerima data dalam bentuk angka. Berdasarkan hasil data penulis dapat menarik kesimpulan kesimpulan yang diterima secara umum.

3.2.2 Sumber Data

Dalam menyajikan Laporan Akhir ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

   Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait yang memahami permasalahan dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

   Data Sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber

seperti buku, jurnal, ataupun berupa pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti atau catatan yang berhubungan dengan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk penulisan laporan akhir ini antara lain:

1. Metode Wawancara, mengumpulkan data menggunakan metode ini dengan cara melalui wawancara atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai sistem dan kendala-kendala dalam penerimaan retribusi parkir dengan pihak kepala bidang parkir secara langsung yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan kepada penulis.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data atau dokumen yang menjadi permasalahan dalam laporan akhir ini.
3. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui penelitian dan observasi langsung yang dilakukan oleh penulis saat melaksanakan praktek kerja lapangan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

3.4 Objek Laporan Akhir

3.4.1 Lokasi dan Waktu

a. Lokasi

Laporan akhir ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang beralamat di Jl. ZA Pagar Alam (komplek terminal rajabasa) Bandar Lampung.

b. Waktu

Laporan akhir ini dilakukan mulai dari 09 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 dengan mengikuti jam dan hari masuk kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

3.4.2 Profil Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, pos dan telekomunikasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3.4.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

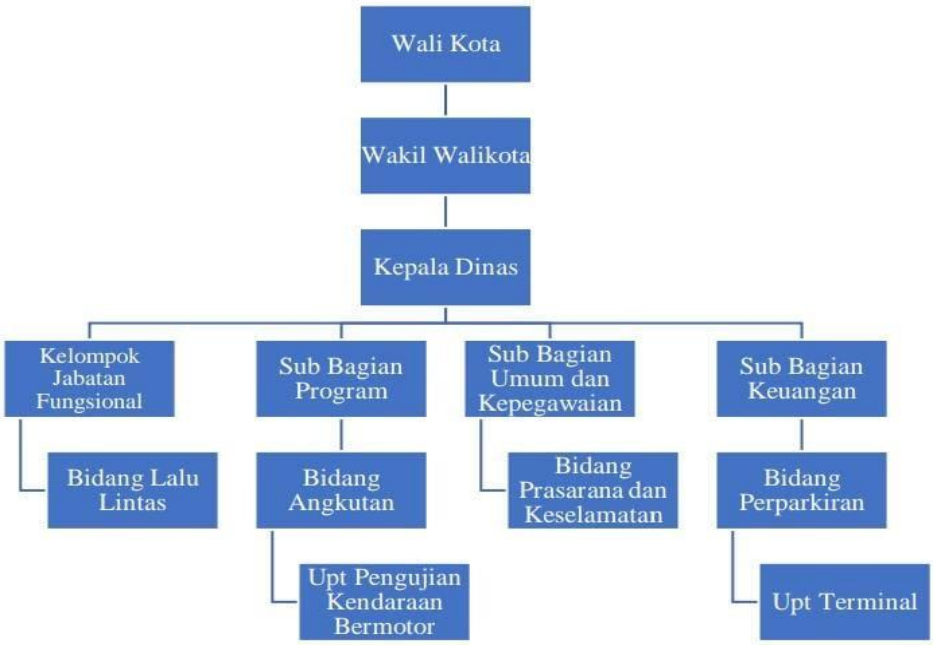

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

3.4.4 Bidang Usaha Instansi

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yaitu:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretariat mempunyai tugas sebagai pengkoordinasian dan penyusun rencana, penataan organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretariat dibantu oleh:

a. Sub Bagian Program dan informasi

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset

3. Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyain tugas sebagai perencanaan dan penyusunan program di bidang lalu lintas jalan, pembangunan perlengkapan jalan.

4. Bidang Angkutan Jalan dan Perhubungan Laut mempunyai tugas sebagai Perencanaan Penyusunan Program di bidang angkutan jalan dan perhubungan laut.

5. Bidang Sarana, prasarana dan Pembinaan Keselamatan mempunyai tugas sebagai penyusunan program perencanaan dan evaluasi dan laporan di bidang sarana, prasarana dan pembinaan keselamatan.

6. Bidang Perparkiran mempunyai tugas sebagai Perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang perparkiran.

7. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor bertugas melakukan uji berkala terhadap kendaraan bermotor untuk menjamin keselamatan berkendara.

8. UPT Terminal bertugas mengelola dan memfasilitasi pengoperasian terminal, seperti penjualan tiket, pengaturan keberangkatan, menyetor dana setoran retribusi terminal ke bagian keuangan.

3.4.5 Visi dan Misi

A. Visi

Visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah: “Penyelenggara Sistem Transportasi Yang Berkualitas” Arti Visi tersebut adalah terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang terpadu, aman, nyaman, tertib dan teratur melalui peningkatan kinerja sarana dan prasarana transportasi dalam menunjang pembangunan Kota Bandar Lampung yang maju dan modern.

B. Misi

Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah:

a) Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang transportasi
b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi

c) Meningkatkan pelayanan jasa sektor transportasi

d) Meningkatkan koordinasi antar intansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi

e) Mengoptimalkan dan meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah sektor transportasi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil tinjauan penulis terhadap Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung penulis menyimpulkan bahwa sistem penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung belum efektif dimana Tanda Bukti Penerimaan (TBP) tidak dibuat dua rangkap, sehingga tidak ada fungsi control di dalam akutansi, hal tersebut mencerminkan internal control yang masih lemah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat diberikan terhadap Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yaitu dengan menambahkan salinan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dibagian bendahara penerimaan dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung diharapkan memperbaiki internal control terkait sistem penerimaan retribusi parkir dan memastikan bahwa penerimaan retribusi parkir dikelola dengan baik, guna mengurangi resiko penyelewengan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, R. R. (2019). Evaluasi Pengelolaan Parkir Di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung.

Dewi, S. R. (2013). Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-25.

Hasan, Z., Putri, P., Fahreza, M. R., & Putri, A. F. (2023). Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 28 Tahun 2009 Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungli Pada Lahan Parkir Pasar Tengah (studi kasus laha parkir pasar tengah Kota Bandar Lampung). *Jurnal Hukum*, *20*(1), 254-265.

Lianda, P. Y., Priantana, R. D., & Aswadi, K. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, *2*(3), 153-159.

Marlia, E. P., & Martha, R. (2022). Kajian Dampak Penerapan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Di Kota Bandar Lampung.

Mustofa, U. A., & Sari, N. P. (2020). Pajak dan Retribusi Parkir terhadap PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2014-2018 dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, *8*(1).

Perdana, R. P. (2023). *Evaluasi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah di Kota Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).

Pratama, F. P. (2021). Pengaruh Retribusi Parkir Kendaraan dan Fasilitas Yang Diberikan Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang (*Doctoral dissertation, STTKD Sekolah Tinggi Teknologi KeDirgantaraan*).

Rachmawati, R. (2021). Analisis Pemungutan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Efektifitas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, *2*(2), 129-138.

Ramdani, D. F., Abubakar, R. R. T., & Dawud, J. (2021). Studi Kebijakan dalam Optimalisasi Pajak dan Retribusi Parkir dalam Mendongkrak PAD di Kota Bandung. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, *3*(2), 263-269.

Republik Indonesia, 2009. Undang-undang Pajak Daerah No. 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta

Riyadi S, D. E. N. I. (2022). Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Parkir.

Rumengan, V. K., Rachman, I., & Kumayas, N. (2020). Pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapat asli daerah kabupaten minahasa. *Jurnal Eksekutif*, *2*(5).

Runtu, M. R. G., Razak, N., Tarang, B., Umar, F. A., & Abdullah, A. R. (2023). Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Kewirausahaan*, *9*(3), 199-211.